

Dinamika Peran Ikhwanul Muslimin dalam Dunia Pendidikan Islam di Qatar: Studi Pendekatan Sejarah

Ali Mursyid Azisi^{1*} Izzah Zulvia Noer^{2*} Moch. Qomaruddin^{3*}

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

²UIN Sunan Ampel Surabaya

³UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: alimursyidazisi18@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang hubungan Qatar dan Ikhwanul Muslimin dalam dunia pendidikan yang dikaji dalam konteks sejarah. Diketahui bahwa dunia pendidikan Qatar dahulu diwarnai oleh peran Ikhwanul Muslimin sebagai tokoh pengajar dari Mesir. Tokoh-tokoh besar layaknya Yusuf Al-Qardhawi merupakan salah satu di antaranya yang turut berperan dalam perkembangan pendidikan di Qatar. Nama besar Qardhawi pun menguntungkan Qatar sebagai negara yang membutuhkan sosok akademisi muslim besar kala itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data primer diambil dari buku, jurnal, dan internet sebagai data pelengkap, yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Artikel ini menemukan bahwa Qatar menjaga hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin terlebih dalam dunia pendidikan yaitu menjamin kalangan Ikhwanul Muslimin untuk tinggal di Qatar. Hal lain yang menjadi penguat adalah pengaruh Syekh Yusuf Qardhawi juga turut berperan dalam upaya memajukan pendidikan Islam di Qatar ala Ikhwanul Muslimin.

Kata Kunci: Qatar, Ikhwanul Muslimin, Pendidikan Islam.

Pendahuluan

Hubungan Qatar dengan tetangganya, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, diregangkan oleh Ikhwanul Muslimin (IM). Salah satu isu yang menyebabkan pecahnya kemitraan ini adalah pandangan yang berbeda dari Qatar dan negara-negara Teluk mengenai peran Ikhwanul Muslimin dalam Arab Spring. Pemerintah Qatar memuji posisi penting IM di dunia Arab, seperti yang terlihat dalam pemilihan kandidat IM di Mesir dan kemenangan partai yang dibantunya. Pasca lengsernya Hosni Mubarak, dukungan terhadap Muhammad Morsi dan Partai Kebebasan dan Keadilan / Freedom and Justice Party (FJP), partai yang beranggotakan para tokoh IM, ditunjukkan dengan pemberian dukungan moril dan material. Sementara negara-negara Teluk lainnya, memiliki pandangan yang berbeda tentang gerakan IM dan partisipasinya dalam Arab Spring (Musim Semi Arab).¹

Raja Abdullah dari Yordania mengungkapkan keprihatinannya tentang peristiwa Arab Spring dalam sebuah wawancara dengan majalah *The Atlantic*, menyatakan bahwa "sebuah 'bulan sabit' Ikhwanul Muslimin sedang berkembang di Mesir dan Turki," sebuah "bulan sabit" yang mengacu pada Arab Spring. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa IM adalah kelompok yang dipimpin oleh "serigala berbulu domba" dan perlu dihentikan untuk memperoleh pengaruh apa pun.² Selain

¹ B. Baskan, *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East*, (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 125.

² *Ibid.*, 125.

yang disebutkan di atas, Arab Saudi dan UEA juga menempuh kebijakan untuk membatasi pengaruh IM selama dan setelah Musim Semi Arab. Jordan tidak sendirian dalam hal ini. Salah satu upayanya adalah memberikan dukungan kepada pemerintah hasil kudeta militer yang menggulingkan Muhammad Mursi, kemudian mendeklarasikan IM sebagai organisasi teroris domestik dan internasional.

Penggulingan /dikudetanya Muhammad Morsi di Mesir tidak menghentikan kebijakan luar negeri Qatar yang pro-IM. Qatar mengklarifikasi posisinya dengan pernyataan diplomatik, yang mengutuk tindakan keras pemerintah terhadap pengikut Morsi serta penahanannya, dan menyerang praktik pemerintah Mesir yang menetapkan IM sebagai kelompok teroris. Isu-isu yang berkaitan dengan IM juga mendapatkan penyiaran yang luas melalui outlet media al-Jazeera, yang terletak di Qatar. Selain itu, Qatar telah memberikan perlindungan bagi para loyalis Morsi yang beremigrasi. Secara umum, dukungan Qatar untuk IM sangat kontras dengan respons regional negara-negara teluk lainnya terhadap Musim Semi Arab.³

Pukulan awal paling parah bagi Qatar pada Maret 2014. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain semuanya menarik duta besar mereka dari Qatar. Menurut klaim yang dibuat di Baskan dan dikutip dari artikel al-Jazeera dari 10 April 2014,⁴ Qatar juga dituduh mendukung sebuah organisasi (IM) yang mengancam "keamanan dan stabilitas" negara-negara GCC selain mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain. Qatar saat itu berada dalam situasi sepi. Hanya setelah upaya konferensi dengan perwakilan negara dalam kerangka GCC barulah tiga negara yang menarik duta besarnya bersedia mengirim mereka kembali dan memperkuat hubungan dengan Qatar pada November 2014.⁵

Seolah-olah déjà vu, Qatar mengalami situasi yang sama tiga tahun sebelumnya tetapi dengan hasil yang lebih buruk. Pada 5 Juni 2017, Bahrain, UEA, dan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.⁶ Kali ini, insiden itu lebih parah karena melibatkan lebih dari sekadar politik tingkat tinggi. Negara ketiga memberikan waktu 14 hari kepada penduduknya untuk meninggalkan tanahnya dan melarang mereka memasuki atau meninggalkan Qatar. Ketiga negara tersebut, bersama dengan Mesir, juga melarang pesawat dari maskapai Qatar menggunakan wilayah udara mereka, dan bahkan menuntut agar penerbangan dari maskapai asing lainnya yang tiba di Qatar atau berangkat dari Qatar mendapatkan otorisasi terlebih dahulu sebelum terbang melintasi wilayah mereka.

Selain itu, Arab Saudi menutup satu-satunya perbatasan darat Qatar dengan tetangganya dan melarang kapal yang mengibarkan bendera Qatar atau melakukan bisnis Qatar untuk berlabuh. Warga Qatar sangat merasakan dampaknya, terutama mengingat saling ketergantungan yang intens di antara negara-negara Teluk. Orang-orang bergegas ke toko segera setelah pengumuman

³ K. C. Ulrichsen, *Qatar and the Arab Spring*, (New York: Oxford University Press, 2014), 154.

⁴ B. Baskan, *Turkey and Qatar*, 127.

⁵ al-Jazeera, "What is the Muslim Brotherhood?" (Diakses pada 7 Mei 2023), link : www.aljazeera.com

⁶ BBC, "Qatar Crisis: What You Need to Know", (Diakses pada 7 Mei 2023), link BBC News: www.bbc.co

perpisahan karena mereka khawatir barang-barang penting tidak akan cukup. Dengan Bandara Internasional Hamad di Doha sepi, maskapai negara, Qatar Airways, terpaksa mengalihkan banyak penerbangan internasional lainnya selain membatalkan 18 penerbangan ke kota. Pasar saham Qatar mengalami penurunan 10%, atau sekitar \$15 triliun, dalam empat minggu pertama setelah penghentian.

Bahwa perselingkuhan ini dikenal sebagai Krisis Diplomatik Qatar dapat dimengerti. Ironisnya, tuntutan yang dibuat Qatar tidak jauh berbeda dengan permintaan pada tahun 2014. BBC merangkum dua penyebab utama kemarahan negara tersebut dalam mengakhiri hubungan kerja dengan Qatar,⁷ termasuk pertama hubungan dekat dengan Qatar. Iran dan kedua dukungannya terhadap kelompok-kelompok Islam, khususnya IM. Tanggapan pemimpin Qatar itu, menurut Menteri Luar Negeri Mohammad bin Abdul Rahman al-Thani, dikutip BBC⁸, adalah jika tetangganya "menuntut kita harus melepaskan superioritas kita," katanya, menambahkan, "tidak akan." Dua kasus dengan penuntutan yang sama, bahkan yang terbaru berdampak pada kehidupan sehari-hari, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang terjadi pada Qatar dan IM. Akibatnya, Qatar bersikeras untuk tetap bersama IM meskipun ada permintaan dari tetangganya untuk melakukan sebaliknya.

Terlepas dari hal di atas, artikel ini mengkaji secara spesifik tentang hubungan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin khususnya di dunia pendidikan. Ikhwanul Muslimin memiliki peran penting dalam pendidikan di Qatar, maka untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran IM, artikel ini perlu dianalisis lebih lanjut. Dengan begitu, nantinya bisa diketahui bagaimana mula Ikhwanul Muslimin memasuki wilayah Qatar dan siapa yang menjadi pembesar tokoh Ikhwan berpengaruh yang memiliki power besar untuk masuk di dunia pendidikan Qatar.

Sejarah Qatar

Qatar, resminya bernama Negara Qatar (bahasa Arab: دولة قطر, *Daulah Qaṭar*), adalah negara-keamiran di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas daratnya adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara pulau Bahrain. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin oleh Keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Syekh Jassim bin Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar. Qatar merupakan negara monarki dan kepala negaranya saat ini adalah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar dapat disebut sebagai negara monarki⁹ konstitusional maupun monarki absolut tergantung opini.¹⁰ Pada tahun 2003,

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ United States Department of State Country Reports on Human Rights Practices for 2011: Qatar Diarsipkan 2017-05-20 di Wayback Machine., 2011.

¹⁰ David Gardener. "Qatar shows how to manage a modern monarchy". Financial Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-24. Diakses tanggal 22 Mei 2023.

konstitusi baru disetujui oleh 98% penduduk.^{[12][13]} Awal tahun 2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa: 313.000 warga negara Qatar dan 2.3 juta ekspatriat.¹¹

Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia.¹² Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar memiliki pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab, mendukung beberapa kelompok pemberontak selama Musim Semi Arab baik secara finansial dan melalui grup media global mereka Jaringan Media Al Jazeera.¹³ Untuk ukurannya, Qatar memegang pengaruh yang cukup penting di dunia. Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, menjadi negara Arab pertama yang mendapatkannya. Pada tahun 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dan melabeli negara ini sebagai negara teroris, menyebabkan krisis diplomatik Qatar 2017.

Setelah dominasi Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah di Qatar, akhirnya Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transito kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, kemudian status protektorat Inggris yang dihentikan pada tahun 1916. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan politik tetapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar dengan membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain.

Dataran Qatar hanya sebesar 160 km dan lebih kecil dari negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir. Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Dukhan. Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar. Qatar dapat dianggap sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825. Tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi yang memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif.¹⁴ Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98%.

Emir kedelapan Qatar adalah Tamim bin Hamad Al Thani, ayahnya adalah Hamad bin Khalifa Al Thani yang menyerahkan kekuasaan padanya 25 Juni 2013. Kanselir tertinggi memiliki

¹¹ "Population of Qatar by nationality - 2017 report". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-22. Diakses tanggal 22 Mei 2023.

¹² "Indices & Data | Human Development Reports". United Nations Development Programme. 14 March 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 January 2013. Diakses tanggal 22 Mei 2023.

¹³ Sam Dagher (17 October 2011). "Tiny Kingdom's Huge Role in Libya Draws Concern". Online.wsj.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-27. Diakses tanggal 22 Mei 2023.

¹⁴ Jennifer Lambert (2011). "Political Reform in Qatar: Participation, Legitimacy and Security". 19 (1). Middle East Policy Council. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-16.

kekuasaan eksklusif untuk memilih dan mencopot perdana menteri dan menteri kabinet yang semuanya membentuk Dewan Menteri. Dewan Menteri adalah otoritas eksekutif tertinggi di negara ini. Dewan Menteri juga memulai legislasi. Hukum dan dekret yang diusulkan Dewan Menteri akan dirujuk ke Dewan Penasihat (Majilis Al Shura) untuk didiskusikan kemudian diberikan ke Emir untuk diratifikasi. Majelis Konsultatif memiliki otoritas legislatif terbatas untuk menyusun dan menyetujui hukum, tapi Emir yang menentukan semuanya di akhir. Anggota dewan saat ini terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh Emir, karena tidak ada pemilihan legislatif sejak 1970. Pemilihan legislatif ditunda sampai paling tidak tahun 2019. Hukum Qatar tidak memperbolehkan pembentukan badan politik atau persatuan dagang.¹⁵

Latar Belakang Ikhwanul Muslimin di Qatar

Mengenai gerakan Islam global, Ikhwanul Muslimin memiliki pandangan tertentu. Meninggalkan pendirinya, Hasan al-Bana, yang lahir pada tahun 1906 di Mahmudiyah, Islamiyah, dari keluarga yang mengenyam pendidikan Islam dan kemudian menjadi guru setelah meraih gelar dari Universitas Darul Ulum di Kairo, berdirilah Tarekat IM. di Ismailiyah pada tahun 1928 sebagai akibat dari pemahaman al-Bana tentang kesenjangan antara cita-cita Islam dan realitas yang dialami warga negaranya. Secara sederhana, Ruslan dalam Ulfah dalam penelitiannya memabakkan perkembangan IM dalam empat fase, yaitu fase perintisan (1928-1932) ditandai dengan fokus kepada gerakan dakwah dan tarbiyah; fase pembinaan dan perkembangan (1932-1939) ditandai dengan berpindahannya kantor pusat dari Ismailiyah ke ibu kota Kairo; fase pembinaan dan perjuangan (1939-1952), ditandai dengan pendirian cabang-cabang secara lebih menyeluruh di daerah-daerah; dan fase revolusi (1952-1954) ditandai dengan semakin massifnya pengaruh IM dalam politik nasional, persinggungan dengan penguasa yang salah satu akibatnya adalah kematian Hasan al-Bana.¹⁶

Periode sebelum revolusi ini menunjukkan proses munculnya pihak-pihak yang berlawanan dari bawah, yang mungkin dipandang oleh pemerintah otoriter di Timur Tengah sebagai ancaman terhadap stabilitas politik negara mereka. Koran Tempo pada tahun 2001 pernah menuliskan setidaknya, "Dibunuh 52 tahun lalu karena pembunuhan orang tak berwajah, Hasan al-Bana masih hidup." Perjuangan Hasan al-Bana dan rekan-rekan IM-nya telah menjadi simbol perjuangan gerakan Islam. Di beberapa wilayah di dunia, ide-idenya masih dibaca, digunakan, dan dikembangkan. Sedikit banyak semua gerakan Islam di seluruh dunia radikal, moderat, dan kekerasan telah dipengaruhi oleh IM. Walau Hasan al-Bana sendiri menggarisbawahi penggunaan kekuatan fisik adalah yang terakhir, setelah kekuatan aqidah dan agama pertama, disusul kekuatan persatuan dan ikatan.

Slogan IM yang paling terkenal, "Islam adalah solusinya," hanya mengkomunikasikan tenor

¹⁵ "The People Want Reform... In Qatar, Too". *Jadaliyya*. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 2017-10-10. Diakses tanggal 22 Mei 2023.

¹⁶ M. N. Ulfah, "Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin", *Jurnal SMART: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, (2016), 213-224

ideologis gerakan tersebut. Konsep fundamental yang diusung IM adalah kedalaman prinsip-prinsip Islam, tidak hanya menyentuh bidang ibadah tetapi juga seluruh aspek kehidupan. Tujuan IM adalah membawa panji jihad dan dakwah kepada Allah untuk mencapai kedamaian dengan ajaran Islam, serta terbentuknya tokoh-tokoh muslim perorangan, rumah tangga Islam, bangsa Islam, pemerintahan Islam, dan negara-negara yang dipimpin oleh Islam. negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IM adalah gerakan Islam yang bertujuan untuk mengadopsi Islam secara bertahap di semua lini kehidupan, termasuk kehidupan sosial dan politik. Ide dan tujuan tersebut diejawantahkan melalui aktivitas-aktivitas organisasi IM yang mendorong aktivisme politik dan responsibilitas sosial.¹⁷

Sekitar tahun 1950-an, kehadiran IM di Qatar pertama kali diketahui.¹⁸ Abd al-Badi Saqr, seorang akademisi dan salah satu tokoh IM terkemuka di Mesir, berperan penting dalam membangun pengaruh IM di Qatar. Kedatangan Abd al-Badi Saqr pada tahun 1954 memisahkan diri dari konteks perubahan sosial yang saat itu terjadi di Qatar, khususnya pertumbuhan penduduk yang berbarengan dengan pertumbuhan bisnis minyak. Sebelum tahun 1950, semenanjung Qatar, yang hanya memiliki 10.000–16.000 penduduk, mengandalkan industri perikanan dan mutiara untuk bertahan hidup. Struktur pemerintahan belum terbentuk di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Transformasi Qatar baru terjadi memasuki 1950-an, saat pemasukan melalui minyak mulai mengalir. Jumlah penduduk pun naik, mencapai 25.000 jiwa, yang berdampak pada semakin dibutuhkannya sektor-sektor pemerintahan di berbagai bidang.

Salah satunya adalah pendidikan; sebelum tahun 1950, Qatar hanya memiliki sekolah informal lokal dengan fokus keagamaan dan satu instruktur (mirip dengan pesantren tradisional di Indonesia), sedangkan pada tahun 1950–1951, hanya ada satu sekolah formal dengan 240 laki-laki dan tidak ada siswa. Wanita. Hal ini menyebabkan Ali bin Abdullah al-Thani, penguasa Qatar saat itu, memilih Jassim al-Darwish untuk mengawasi komite yang bertugas merancang sistem pendidikan negara pada tahun 1951–1952. Sementara itu, anggota IM hadir khusus untuk mengisi sektor pendidikan pada tahun 1950-an, seperti yang juga terjadi di daerah lain.¹⁹

IM berisi individu terkemuka. Saat tahun 1960-an dimulai, semakin banyak orang mulai berdatangan ke Qatar. Abdullah bin Tukri al-Subai, kepala pendidikan agama Islam di departemen pendidikan pada saat itu, mengadakan perjalanan ke Al-Azhar untuk merekrut calon dan akademisi.²⁰ Salah satu tokoh terkemuka yang memakai julukan al-Subai adalah Ahmed al-Assal, yang tiba di Qatar pada tahun 1960 dan segera mulai terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan agama, termasuk mengajar di ruang kelas dan memberikan ceramah di masjid, serta membantu dalam pembentukan grup IM di sana. Lalu ada Abdel-Moaz al-Sattar, yang menjabat sebagai perwakilan pribadi Hassan al-Banna ke Palestina pada tahun 1946. Ia juga seorang inspektur sekolah

¹⁷ al-Jazeera, “What is the Muslim Brotherhood?”

¹⁸ H. E. Korui, *The Islamist Factory (Short Version)*, (Paris: Institut Montaigne, 2018), 29.

¹⁹ D. Robert, “Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism or Preference?” (diakses pada 5 Mei 2023), link: www.mepec.org

²⁰ Ibid.

dan direktur pendidikan agama Islam untuk Kementerian Pendidikan, dan pada awal 1960-an, ia ikut menulis beberapa buku teks untuk sistem pendidikan Qatar yang baru.

Peran Ikhwanul Muslimin dalam Dunia Pendidikan

Berkaca dari tujuan transformatif Qatar yang dituliskan oleh Al-Hor dkk,²¹ tentunya sektor pendidikan punya relevansi kuat ke arah sana. Perkembangan suatu masyarakat secara spesifik, atau transformasi suatu negara secara umum, tidak dapat terlepas dari pendidikan. Demi mencapai tujuan transformatif tersebut, Qatar telah beberapa kali melakukan reformasi pendidikan. Beberapa kali dilakukan pada 1970-an dan 1980-an. Reformasi pendidikan paling anyar dilakukan pada 1990-an, dimana Qatar menggaet RAND Corporation dari AS untuk memberikan rekomendasi berdasarkan analisa komprehensif terhadap kelemahan-kelemahan pendidikan mereka.²² Hasil dari reformasi terkahir inilah yang sampai saat ini masih dipakai. Meski saat ini pendidikan di Qatar lebih condong mengacu pada konsep-konsep Barat, tapi kontribusi penting IM telah ada jauh ke belakang apabila ditinjau dari segi historis. Kedatangan IM pertama kali ke Qatar berbarengan dengan dimulainya pembangunan pendidikan negara tersebut.

Tahun 1950-an, sektor pendidikan Qatar mulai bertransformasi dari sistem pendidikan tradisional, menuju sistem pendidikan modern. Referensi dari sistem pendidikan baru tersebut, pada masa itu, adalah Mesir. Rekrutmen guru-guru dilakukan di Mesir. Konsultan-konsultan pendidikan juga dicari dari Universitas Al-Azhar. Tidak sampai di sana, kurikulum Qatar yang pertama didasarkan pada kurikulum pendidikan di Mesir. Mesir dipilih karena sistem pendidikan di sana dipandang lebih maju dan sesuai dengan kebudayaan masyarakat Qatar. Kesesuaian itu terdapat pada nilai kebudayaan Islam, dimana Mesir memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam yang dipadukan dengan pendidikan umum. Mengingat sistem pendidikan tradisional Qatar yang menitikberatkan pada pelajaran agama, maka terdapat benang merah yang mempermudah transisi menuju sistem pendidikan modern Mesir yang menyeimbangkan pendidikan agama dan umum.

Proses inilah yang menjadi titik akses kehadiran IM di Qatar. Al-Kobaisi²³ mencatat, pada waktu itu sebagian besar guru yang direkrut untuk mengajar pada sekolah-sekolah di Qatar secara ideologis mendukung IM. Tinjauan historis ini memberi kesimpulan bahwa IM berkontribusi dalam membangun fondasi sistem pendidikan di Qatar. Pemanfaatan IM dalam pengembangan sistem pendidikan ini adalah salah satu bentuk penggunaan nested power di dalam negeri yang dilakukan oleh Qatar. Dominasi konsep-konsep pendidikan Barat yang dibawa oleh RAND Corporation ke Qatar kini memang membuat pengaruh IM pada sektor ini berkurang, tapi bukan berarti mereka

²¹ Al Horr dkk., A. (2016). *Qatar's Global-Local Nexus: From Soft to Nested Power*. In M. E. Tok, L. R. Alkhater, L. A. Pal, & ed., *Policy-Making in a Transformative State, the Case of Qatar*, (London: Palgrave Macmillan), 363.

²² R Nasser, (2017). "Qatar's Educational Reform Past and Future: Challenges in Teacher Development." *Open Review of Educational Research*, 2.

²³ A. J. Al-Kobaisi. (1979). *The Development of Education in Qatar, 1950 - 1977, with an Analysis of Some Educational Problems*. Durham: Durham University.

hilang sama sekali. Pengajar-pengajar “berhaluan” IM tetap ada berseliweran di sekolah-sekolah Qatar. Seperti yang ditemukan dalam catatan Freer,²⁴ seorang narasumber menjelaskan “Guru-guru umumnya perempuan dan datang dari lingkungan konservatif di Mesir, Yordania, Suriah. Sebagian besar memiliki sikap keagamaan yang konservatif, mereka simpati dengan Ikhwanul Muslimin, walaupun mereka mungkin tidak terlibat dalam politiknya.”

Penggunaan kurikulum yang mengacu pada Barat, yang mana alirannya cenderung sekuler, menimbulkan kekecewaan tersendiri pada sebagian masyarakat Qatar. Kekecewaan tersebut berupa jarang digunakannya Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di beberapa sekolah serta berkurangnya pendalaman pada mata pelajaran agama Islam. Pengurangan penggunaan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar khususnya, menimbulkan perdebatan di masyarakat dan menyebabkan ketegangan antara penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli menganggap pemerintah membuka pendidikan baru hanya untuk para pendatang, setelah banyak calon murid dari penduduk asli tidak dapat lolos seleksi karena kemampuan Bahasa Inggris yang kurang. Pemerintah segera bergerak cepat dengan merevisi beberapa poin kurikulum terkait penggunaan bahasa pengantar, dan menyeimbangkan penggunaan bahasa asing dan Bahasa Arab.²⁵

Kejadian ini menunjukkan perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum akan terus terjadi menyesuaikan dengan zaman dan tuntutan masyarakat. Saat ini konsep yang dominan adalah Barat, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan konsep pendidikan Islam lebih populer. Masyarakat pun masih banyak yang tetap menginginkan karakter pendidikan sesuai dengan nilai kebudayaan mereka, kebudayaan Arab dan Islam; sebuah ruang yang pastinya dikuasai oleh pengajar-pengajar dari IM. Selama pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan di Qatar, selama itu pula kehadiran IM melalui kader-kadernya masih dibutuhkan.

Ikhwanul Muslimin dan Stabilitas Politik Qatar

Stabilitas politik dalam negeri merupakan faktor lain yang mempengaruhi bagaimana suatu negara berubah dan berkembang. Stabilitas politik, sebagaimana didefinisikan oleh, adalah keteraturan arus komoditas politik, yaitu pertukaran uang, informasi, dan kebijakan lainnya di antara para aktor politik. Semakin stabil iklim politik suatu bangsa semakin konsisten arusnya.²⁶ Potensi politik terkadang bisa bergantung pada rutinitas aktor politik, dan bisa juga berdasarkan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh penguasa. Jika para pelaku politik melakukan tindakan yang melanggar norma dan batasan yang telah ditetapkan, maka akan terjadi ketidakstabilan politik (political instability). Jika anggota komunitas ekonomi (investor, dll.) ingin membuat rencana untuk pembangunan masa depan dan memastikan hubungan yang stabil antara kontribusi mereka terhadap aktivitas ekonomi dan hasil yang mereka dapatkan, stabilitas politik merupakan persyaratan, menurut

²⁴ C. Freer, (2018). *Rentier Islamism, the Influences of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies*. New York: Oxford University Press.

²⁵ Al-Horr dkk (2016).

²⁶ C. Ake, *A Definition of Political Stability. Comparative Politics*, (1975), 273.

Kuznets dalam Radu.²⁷

Kerusuhan / ketidakstabilan politik, sementara itu hanya akan merugikan kemajuan. Menurut Radu , ketidakstabilan politik memiliki setidaknya dua dampak yang merugikan terhadap pembangunan, termasuk terganggunya hubungan pengusaha dan pasar dan pembatasan investasi karena skenario lingkungan yang bergejolak. Stabilitas politik tidak diragukan lagi merupakan salah satu perhatian utama yang harus dicapai oleh negara seperti Qatar yang sedang mengejar reformasi dan kemajuan.²⁸ Partisipasi oposisi dalam politik sebagai aktor politik dalam sistem politik suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan instabilitas politik. Oposisi berusaha untuk beroperasi di luar pola interaksional politik saat ini. Oposisi mencoba untuk bekerja di luar pola-pola interaksi politis yang sudah ada. Mereka dapat mempengaruhi aktor-aktor lain, dan memanipulasi berjalannya sistem, sehingga membentuk pola-pola interaksi baru, yang berakibat pada terciptanya ketidakstabilan politik.

Efek merugikan dari ketidakstabilan politik adalah apa yang berusaha dicegah oleh pemerintah suatu negara. Mengingat potensi yang dapat diciptakan oleh tumbuhnya kelompok-kelompok yang bersaing, salah satu pendekatan pemerintah suatu negara untuk menjaga stabilitas politik adalah dengan hati-hati membatasi atau bahkan membatasi gerakan oposisi. Apa yang terjadi antara IM dan banyak negara Teluk cocok dengan deskripsi ini. Negara-negara mengambil tindakan keras terhadap IM karena dipandang sebagai musuh potensial yang memiliki kapasitas untuk menggoyahkan politik dan mengancam stabilitas politik. Misalnya, Arab Saudi dan UEA secara aktif mendesak anggota GCC lainnya untuk bergabung dalam mengambil tindakan keras terhadap IM setelah kerusuhan dunia Arab (Arab springs) tahun 2011, dalam upaya untuk membangun "lingkungan keamanan bebas IM" (Ikhwanul Muslimin- lingkungan keamanan gratis) di semenanjung Arab, demikian ditulis oleh Dickinson.²⁹

Kasus Qatar tampaknya bertujuan untuk mengatasi premis yang disebutkan di atas. Qatar sedang mengembangkan hubungan dengan IM, yang dipandang oleh negara-negara Teluk lainnya sebagai oposisi yang berpotensi mendestabilisasi, terlepas dari kenyataan bahwa stabilitas politik diperlukan untuk kemajuan Qatar. Sepintas, perilaku ini tampak ironis, namun jika dilihat dalam konteks kekuasaan yang berlapis, terlihat jelas bahwa perilaku ini sejalan dengan strategi suatu bangsa dalam menguasai sarana kekuasaan. Penggunaan IM oleh Qatar di tingkat lokal (dalam negara) menunjukkan sudut pandang khas yang dimiliki negara ini. Jika elit berkomunikasi satu sama lain atau mencapai kesepakatan, stabilitas dapat dipertahankan. Jika dilihat lebih dekat, hubungan yang berkembang antara Qatar dan IM adalah hubungan antar elite. Warren lebih menekankan bahwa hubungan ini adalah ikatan manusia yang erat daripada pemahaman sederhana atau tindakan realpolitik. Kedekatan keluarga Al-Thani dengan Syekh Yusuf Qaradhawi memberikan gambaran

²⁷ M. Radu, "Political Stability - a Condition for Sustainable Growth in Romania?" *Procedia Economics and Finance*, (2015), 752.

²⁸ *Ibid.*, 752.

²⁹ M. Hedges & G. Cafiero, *The GCC and the Muslim Brotherhood: What Does the Future Hold?* . (Middle East Policy: 2017), 129.

yang jelas tentang hubungan antar elit.³⁰

Dalam hal ini, jelas bahwa IM di Qatar tidak menampilkan dirinya sebagai musuh rezim, seperti halnya di negara-negara otokratis Timur Tengah lainnya. Untuk memenuhi kepentingan ideologis dan praktis IM, hubungan antar-elit antara IM dan Qatar dikembangkan. Keluarga kerajaan Qatar telah lama menjadi sponsor utama Qaradawi, menawarinya tempat untuk kuliah dan membiayai perjalanannya ke Eropa dan Asia. Gerakan IM sangat dipengaruhi oleh Qaradawi sendiri. Meskipun menolak dua kali tawaran untuk menjabat sebagai ketua umum IM (mursyid 'aam), Qaradawi untuk waktu yang lama dianggap sebagai pemimpin spiritual gerakan baik oleh orang luar maupun pengikut IM. Bahkan bagi anggota IM, fatwa Qaradhawi memainkan peran penting dalam memberikan landasan moral bagi tindakan mereka. Komentar Qaradhawi terkadang dilihat oleh sebagian orang sebagai suara gerakan IM.³¹

Secara khusus, pendekatan strategis Qaradawi termasuk membantu bantahan jaringan IM nasional terhadap kelompok oposisi. Krisis Musim Semi Arab terbaru memberikan contoh terbaik dari pengaruhnya. Menurut Warren (2017), selama Musim Semi Arab 2011, Qaradawi menggunakan kepemimpinannya di International Union of Muslim Scholars (IUMS), sebuah jaringan global sarjana internasional yang didirikan di Qatar, serta posisinya di Al-Jazeera (terutama melalui program kuliahnya, "Syariah dan Kehidupan") untuk memberikan legitimasi pergolakan yang terjadi di wilayah tersebut menurut hukum Islam.

Dukungan untuk Qaradhawi selama Musim Semi Arab sebelumnya melampaui para pengunjuk rasa. Bahrain adalah orang asing, karena Qaradawi secara aktif mendukung pemerintahan melawan oposisi. Ini terkait erat dengan lanskap politik Bahrain, yang didominasi oleh Syiah dan dijalankan oleh minoritas Sunni. Seorang pendukung vokal pemerintahan terpilih Muhammad Morsi di Mesir, Qaradawi mengecam pengambilalihan militer yang menggulingkannya setahun kemudian dan mendesak para pendukung Morsi untuk berdemonstrasi menentang kudeta. Dua contoh ini menunjukkan pengaruh Qaradhawi dalam dinamika politik. Ke mana pun ia pergi, orang-orang memperhatikannya karena statusnya sebagai imam, dan anggota IM mempercayainya.

Mengenai stabilitas Qatar sekali lagi, hubungan dapat ditarik antara kemampuan dan kedekatan Qaradawi dengan keluarga Al-Thani dan kasus utamanya dari Musim Semi Arab. Menurut teori nested power, Qatar memanfaatkan ikatan eratnya dengan elit IM, dan khususnya Syekh Yusuf Qaradhawi, untuk menegakkan stabilitas politik di negara tersebut. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa Qatar tidak mengalami keresahan seperti yang dialami negara-negara lain selama fenomena Musim Semi Arab. Gerakan oposisi berbasis Islam belum pernah ada di Qatar sebelum Musim Semi Arab. Benar bahwa ada gerakan oposisi di Qatar di tingkat lokal, tetapi mereka seringkali memiliki landasan sekuler-liberal. Gerakan oposisi juga ada di dalam keluarga kerajaan, tetapi mereka hanya menantang otoritas tanpa nuansa keagamaan. Tapi tidak dengan melakukan

³⁰ D. H. Warren, *Qatari Support for the Muslim Brotherhood is More Than Just Realpolitik, It has a Long, Personal History*. diambil Maydan, Politics and Society (2017), (diakses pada 5 Mei 2023), link: www.themaydan.co

³¹ Ibid.,

penangkapan dan penuntutan yang keras, Qatar mampu mengakhiri kebangkitan gerakan oposisi Islam di dalam perbatasannya. Stabilitas politik domestik dipertahankan di Qatar seperti sebuah transaksi, dan gerakan Islam diberikan kebebasan yang cukup besar untuk beroperasi di sana. Selain itu, bantuan finansial dan moral diberikan kepada IM secara khusus. Sudut pandang ini, yang membedakan Qatar dari negara lain, tercermin dalam penerapan otoritas lokalnya yang berbeda.

Kesimpulan

Meskipun ditekan sedemikian rupa, Qatar tetap bersikukuh mempertahankan status-quo relasinya dengan IM. Alasan Qatar tidak merubah apapun terkait relasinya dengan IM dalam kajian ini coba dijelaskan dengan menggunakan teori nested power. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah negara mengamankan kepentingannya dalam tiga dimensi yang berbeda (lokal, regional, dan global) dengan menggunakan berbagai atribut-atribut kekuatan yang dimiliki. Kajian ini menemukan Qatar memiliki kepentingan terhadap IM dalam tiga dimensi tersebut, membuatnya sukar untuk melepaskan relasi yang sudah ada. Pada dimensi lokal, IM masih diperlukan untuk mengisi pos-pos di sektor pendidikan, utamanya pendidikan agama. Terlepas dari dipromosikannya sistem pendidikan ala Barat di Qatar, belakangan hal itu mendapat kritik dari masyarakat, dan pendidikan agama justru semakin meningkat peminatnya. Masih pada dimensi lokal, IM juga diperlukan untuk mempertahankan ruang-ruang stabilitas di tengah masyarakat Qatar. Tidak dapat dipungkiri geliat IM di Qatar berbeda dengan di negara lain. Kehadiran IM di suatu negara biasanya menjelma menjadi suatu gerakan oposisi, sementara di Qatar, IM justru berada dalam lingkaran penguasa. Hal ini memberikan Qatar posisi unik dimana gerakan oposisi berbasis Islamisme justru tidak muncul di negaranya, contohnya ketika Arab Spring lalu. Dimensi selanjutnya adalah regional, atau dalam konteks Qatar kawasan Teluk Persia, dan Timur Tengah secara lebih general. IM, pada dimensi ini, memiliki peran penting dalam politik luar negeri Qatar.

Daftar Pustaka

- Ake, C., *A Definition of Political Stability. Comparative Politics*, (1975).
- Al Horr, A. dkk, *Qatar's Global-Local Nexus: From Soft to Nested Power. In M. E. Tok, L. R. Alkhatir, L. A. Pal, & ed., Policy-Making in a Transformative State, the Case of Qatar*, (London: Palgrave Macmillan, 2016).
- Al-Kobaisi, A. J, *The Development of Education in Qatar, 1950 - 1977, with an Analysis of Some Educational Problems*. (Durham: Durham University, 1979).
- Baskan, B., *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East*, (New York: Palgrave Macmillan, 2016).
- Hedges, M. & G. Cafiero, *The GCC and the Muslim Brotherhood: What Does the Future Hold? .* (Middle East Policy: 2017).
- Korui, H. E., *The Islamist Factory (Short Version)*, (Paris: Institut Montaigne, 2018).

- Radu, M., “Political Stability - a Condition for Sustainable Growth in Romania?” *Procedia Economics and Finance*, (2015).
- Sanroma, M., *Qatar During the Reign of Hamad Al Thani (1995-2013): From Soft Power to Hard Power*, (Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau, 2015).
- Thorhallsson, B., *Studying Small States: A Review. Small States & Territories*, (2018).
- Ulfah, M. N, “Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin”, *Jurnal SMART: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, (2016).
- Ulrichsen, K. C., *Qatar and the Arab Spring*, (New York: Oxford University Press, 2014).
- Website:
- al-Jazeera, “What is the Muslim Brotherhood?” (Diakses pada 7 Mei 2023), link : www.aljazeera.com
- BBC, “Qatar Crisis: What You Need to Know”, (Diakses pada 7 Mei 2023), link BBC News: www.bbc.co
- D. Robert, “Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism or Preference?” (diakses pada 5 Mei 2023), link: www.mepc.org
- D. H. Warren, *Qatari Support for the Muslim Brotherhood is More Than Just Realpolitik, It has a Long, Personal History*. diambil Maydan, *Politics and Society* (2017), (diakses pada 5 Mei 2023), link: www.themaydan.co
- Q. Charity, “Qatar Charity Launches "Ghaith" (Rain) Initiative for Islamic Projects Worldwide”. Diambil dari Qatar Charity (diakses pada 4 Mei 2023), link:: <https://www.qcharity.org/>
- S. Moubayed, “How Qatar Funds Muslim Brotherhood Expansion in Europe”, diambil dari Gulf News, (diakses pada 4 Mei 2023), link: www.gulfnews.com
- D. Crossland, “Bavaria Seeks Qatar Funding to Build Dh180m Mosque” diambil dari The National “, (diakses pada 4 Mei 2023), link: www.thenational.ae